

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah mengubah cara pemerintah dan masyarakat berinteraksi dengan ruang publik digital, khususnya dalam hal pengembangan infrastruktur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana peran akun Instagram @dprd_diy digunakan oleh masyarakat dan DPRD DIY sebagai platform untuk diskusi publik. Teori ruang publik Jorgen Habermas digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi prinsip keterbukaan, kesetaraan partisipasi, dan diskursus rasional dalam praktik komunikasi digital. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap pengelola akun, pengamat politik, dan followers aktif @dprd_diy. Hasil penelitian menunjukkan, akun Instagram @dprd_diy lebih banyak digunakan sebagai kanal informasi satu arah daripada ruang dialog dua arah. Ada sedikit interaksi publik dan respons terhadap aspirasi masyarakat belum maksimal. Agar akun ini benar-benar menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, strategi komunikasi yang lebih partisipatif dan responsif diperlukan karena prinsip ruang publik digital ideal belum sepenuhnya diterapkan.

Kata Kunci: Media Sosial, Instagram, DPRD DIY, Ruang Publik, Pembangunan Infrastruktur, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

The development of social media has transformed the way governments and citizens interact within the digital public sphere, particularly in the area of infrastructure development. This study aims to examine how the Instagram account @dprd_diy is used by the public and DPRD DIY as a platform for public discussion. Jurgen Habermas's public sphere theory serves as the foundation for evaluating the principles of openness, equal participation, and rational discourse in digital communication practices. A qualitative method was employed, involving observation, documentation, and in-depth interviews with account administrators, political observers, and active followers of @dprd_diy. The findings show that the @dprd_diy account is more often used as a one-way information channel rather than a two-way dialogue platform. Public interaction remains limited, and the account's responsiveness to public aspirations is still lacking. To ensure this account truly bridges the gap between the public and the government, a more participatory and responsive communication strategy is needed, as the ideal principles of a digital public sphere have yet to be fully implemented.

Keywords: Social Media, Instagram, DPRD DIY, Digital Public Sphere, Infrastructure, Public Participatin